

BLIBLIOGRAPHY

A. BOOKS

Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, P. 52.

Adami Chazawi, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, P. 78

Andi Hamzah, (2005) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, P.31

Andi Hamzah. (2014) *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief, (2001) Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, P. 23

Ch. J. Enschede, (2002), *Beginnselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer. P. 151

Dani K, Eddy O.S H, Marcus P. G, Sigid R and Supriyadi, (2006), *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena: Ilmu dan Amal, Jakarta, P. 6-7

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, P. 115

Fuady, M. (2007). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum dan Masyarakat", Bandung: Citra Aditya Bakti, P. 75

H. Sasangka, & L.Rosita. (2003) Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Mandar Maju, P. 11

Hagen, F. E., (2013), *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode Dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Herbert L Packer. (1968), *The Limits of The Criminal Sanction*, Oxford University Press. P. 364

Hiariej, E.O.S. (2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. P. 134

Hiariej, E.O.S. *op.cit.*,. P. 136

Hugh D. (1984), Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, P. 9

Hutabarat, R. Y., & Putra, C. S. (2016). "Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan" (1st ed.). Bogor: IN MEDIA. Jakarta: Stora Grafika P. 208

- Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, P. 78
- Mukti Arto, (2004) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, P. 140
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, P. 192
- P. A. F. Lamintang. (2013) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Piers beirne and James Messerschmidt, (1995), *Criminology*, second edition, Hardcourt, Brage Collage Publisher, P. 13
- Piers Beirne and James Messrschmidt, Op.Cit P. 14
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Roeslan Saleh, (1993), “*Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*”, Faculty of Law UII, Yogyakarta. P. 38-39.
- Roeslan Saleh. (1983) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, P. 75
- Royani, N. (2021) “Kebijakan Pemerintah Daerah Pulau Jawa Dan Pulau Bali Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19,” 3(1), P. 15–29
- S. R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet.2*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, P. 13-14
- Soerjono Soekanto, (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, P. 62
- Sorjono Soekanto, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, P. 6
- Sudarto, (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, P. 31
- Stepen Huwitz (1986), *Kriminologi, Saduran Moeljatno*, Bina Aksara, Jakarta, P. 86
- Van Hamel, G.A, (1913), *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's- Gravenhage. P. 8

Yesmil Anwar & Adang, (2017), "Kriminologi", PT Rafika Aditama, Bandung, P.14

Zainal Abidin, (2005) *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta, Elsam, P. 11

B. JOURNALS

Firdaus, A., Faculty of Law, (2020). "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19" *Majalah Hukum Nasional*, Quality University, University of North Sumatra & Pakpahan, R. H.

Hasan, P.A.Z., Badu, L.W., Imran, S.Y. (2021). "Basis for Judges' Considerations in Decisions on Persecution Cases " *Estudiante Law Journal*. Vol. 2 (1): 269-282

Jajang Cardidi. (2014). *Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*. E-Journal Graduate Unpar. 1 (2), 29

Ni Nengah Adiyaryani. (2019). *Keyakinan Hakim Dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Laporan Penelitian Mandiri, P. 2

Prakarsa, A., Herli, D., & Yulia, R. (2021). "Mengkaji Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Indonesia" *Journal Hukum Dan Pembangunan*, Faculty of Law, University of Sultan AgengTirtayasa 774–785. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3134>

Pratama, N. A. and Hidayat, D. (2020) "*Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Memaknai Social Distancing*", *Jurnal Digital Media dan Relationship*, 2(1). doi: 10.51977/jdigital.v2i1.270.

Rusli Effendi dkk, (1986) *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta, Binacipta. P. 64-65

Soetandyo Wignjosoebroto, (1993). "*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*", Fakultas Hukum UIL, Yogyakarta, P. 1

Sulis, R. (2021) *Polri di Masa Pandemi covid-19 : Kompleksitas Masalah penegakan Hukum Dan Pilihan solusi*, PUSAT RISET POLITIK Available at: <https://politik.brin.go.id/kolom/covid-19-dalam->

[perspektif-politik/polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi/](#)

Surohmat. (2021). “Pengaturan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum”. *Al-Qisth Law Review*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.99-128>

Ubwarin, E. & Corputty, P. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Faculty of Law, University of Pattimura* 9(1), 1. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.104>

C. WEB PAGES

Adonara, F.F. (2016) “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai amanat konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, 12(2), p. 217. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1222>

Artio (2020), *Sidang Di Tempat Pelanggaran Protokol Kesehatan - Pengadilan Negeri Kediri*. Available at: <https://pn-kediri.go.id/index.php/component/k2/item/525-sidang-ditempat-protokol-kesehatan.html>

Centers for Disease Control and Prevention (2022) “Disease of the Week - COVID-19,” <https://www.cdc.gov/dotw/covid-19/index.html>.

Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, *University of North Sumatra* 50(2), 201–219. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>

Dubourthoumi, (2020) “Coronavirus disease 2019 (COVID-19): What is it really?” UNICEF West and Central Africa. from <https://www.unicef.org/wca/what-is-coronavirus>

Frias, L. and Kaplan, J. (2020) “Our ongoing list of how countries are reopening, and which ones remain under lockdown, *Business Insider*.” <https://www.businessinsider.com/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3#italy-introduced-new-measures-in-august-for-the-first-time-since-its-lockdown-ended-but-seems-to-have-held-off-a-second-wave-9>

Hermansyah, A. (2021). “Menolak Vaksin Corona Bisa Dipidana?” *Detiknews*. <https://news.detik.com/kolom/d-5348835/menolak-vaksin-corona-bisa-dipidana>

- Himawan (2020) *Kapolri Keluarkan Maklumat Terkait pandemi covid-19, bekasikab*. Available at: <https://www.bekasikab.go.id/kapolri-keluarkan-maklumat-terkait-pandemi-covid19>.
- Humas (2020) *Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Available at: <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-covid-19/>.
- Karim, R. (2020). *Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber Hukum*. Buku Deepublish. <https://deepublishstore.com/materi/hukum-pidana/>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2020) *Update covid-19 selasa 31 maret : 1.528 positif, 81 Sembuh, 136 kematian, P2P Kemenkes RI*. Available at: <http://p2p.kemkes.go.id/update-covid-19-selasa-31-maret-1-528-positif-81-semboh-136-kematian/>
- Kominfo, P. (2021) *Berlaku Mulai 22 Juni, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro, Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35155/berlaku-mulai-22-juni-inilah-ketentuan-pengetatan-ppkm-mikro/0/berita>
- Kurniawan, A. (2021) *Pelaksanaan PPKM Dalam Penanganan Kasus covid-19 Dan Evaluasinya*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>
- Kurniawan, R.F. (2021) “*Ini Perbedaan aturan PPKM level 1, 2, 3 dan 4*”, KOMPAS.com. Kompas.com. Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/150000165/ini-perbedaan-aturan-ppkm-level-1-2-3-dan-4>
- LaMance, K. (2022) *Mala in se crimes*, LegalMatch Law Library. LegalMatch. <https://www.legalmatch.com/law-library/article/mala-in-se-crimes.html#:~:text=The%20phrase%20%E2%80%9Cmala%20in%20se,public%20intoxication%2C%20and%20parking%20violations>
- Lase, M. (2022) “*Contoh Tindak Pidana pelanggaran Dalam Kuhp*,” aksarahukum.my.id. <https://www.aksarahukum.my.id/2022/03/contoh-tindak-pidana-pelanggaran-dalam-kuhp.html>
- Luthan, S. (2009). “*Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Masyoyok (2020) *Satpol pp memberi Sanksi Bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja*. Available at:

<https://satpolpp.rembangkab.go.id/satpol-pp-memberi-sanksi-bagi-masyarakat-yang-tidak-mematuhi-protokol-kesehatan/>.

- Mulyono, D. (2021) " *Pengertian Kriminalitas Menurut Para Ahli, Ini Penjelasannya, Sosiologi Info.* " *Sosiologi Info.* Available at: <https://www.sosiologi.info/2021/10/pengertian-kriminalitas-menurut-para-ahli.html>.
- Nugraha, I. (2021) *Anaknya Pilih Dipenjara Daripada bayar RP 5 juta, Ayah Pemilik Kedai kopi: Saya Bangga*, KOMPAS.com. Available at: <https://pemilu.kompas.com/read/2021/07/15/163257878/anaknya-pilih-dipenjara-daripada-bayar-rp-5-juta-ayah-pemilik-kedai-kopi>.
- Nugroho, T.P. (2020) *Ombudsman Minta Pergub sanksi PSBB Menjadi Perda, Berita - Ombudsman RI.* Available at: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda>.
- Nurhanisah, Y. (2020) *Penerapan Psbb Di Sejumlah Wilayah Indonesia: Indonesia Baik*, *indonesiabaik*. Available at: <https://indonesiabaik.id/infografis/penerapan-psbb-di-sejumlah-wilayah-indonesia>.
- Nurita, D. (2021) *Gonta-Ganti Istilah Dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?*, *Tempo*. TEMPO.CO. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya>.
- P2P Kemenkes RI (2020) *Usulan PSBB Bisa Jadi Solusi covid-19*, *permenkes no 9 tahun 2020 Atur Tata Caranya*, *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. Available at: <http://p2p.kemkes.go.id/usulan-psbb-bisa-jadi-solusi-covid-19-permenkes-no-9-atur-tata-caranya>.
- Pearce, K. (2020) "What is social distancing and how can it slow the spread of covid-19?," *The Hub*. Available at: <https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/>
- Penampi, D. (2020) *Mengenal Istilah Zona Hijau, Kuning, orange, Dan Merah Dalam Penanganan Covid-19, Desa Penampi*. Available at: <http://penampi.desa.id/berita/detail/mengenal-istilah-zona-hijau-kuning-orange-dan-merah-dalam-penanganan-covid19>.
- PN Bandung (2020) *Persidangan Sidang Online Tindak Pidana Ringan pelanggaran Protokol Kesehatan PPKM Darurat*. Available at: <https://pn-bandung.go.id/berita-persidangan-sidang->

[online-tindak-pidana-ringan-pelanggaran-protokol-kesehatan-ppkm-darurat.html](#)

World Health Organizaton. (2020) “Coronavirus Disease (Covid-19).” World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (Coronavirus, n.d.)1.

D. LAW

Article 152 paragraph 1 Law No. 36 concerning Health

Article 5 of Governor of East Java Regulation Number 53 of 2020 Concerning Implementation of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019.

Decision No. 173/PID.SUS/2021/PT, DKI

Decree of the Chairperson of the Madiun District Court 107/Pid.C/2020/PN Madiun
Decree of the Chairperson of the Madiun
District Court Number 217/Pid.C/2020/PN Madiun

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus DISEASE 2019 (COVID-19)

Imendagri Nomor 1 Tahun 2021

Kepmenkes Nomor K.01.07/MENKES/4805/2021 Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-1

